

ASPEK PERPAJAKAN ATAS PENGENDALIAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP EFISIENSI PENGELUARAN KAS

Tjandra Wasesa^a, Sugiharto^b, Bambang Karnaen P.^c

^{a,b,c} Fakultas Ekonomi, Universitas 45 Surabaya

ABSTRACT

Each unit of business activity certainly has the desire to continue to grow. Therefore efforts to increase sales as a step to achieve revenue targets must be planned properly, as well as optimal control of costs incurred for business operations, so that cash assets used to pay operational costs must be controlled. One of the efforts to control operational costs is by paying attention to the taxation aspects related to operational expenses which cannot be charged as a deduction from business income. So it can be concluded that it becomes a consideration for companies to pay attention to the taxation aspect of controlling operational costs in order to achieve the efficiency of company cash disbursements.

Keywords: Operational cost.

ABSTRAK

Setiap unit kegiatan usaha tentunya memiliki keinginan untuk terus berkembang. Oleh karena itu upaya peningkatan penjualan sebagai langkah pencapaian target pendapatan harus direncanakan dengan baik, serta pengendalian biaya yang dikeluarkan untuk operasional bisnis secara optimal, sehingga aset kas yang digunakan untuk membayar biaya operasional harus dapat dikendalikan. Salah satu upaya pengendalian biaya operasional adalah dengan memperhatikan aspek perpajakan terkait biaya operasional yang tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan usaha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk memperhatikan aspek perpajakan dalam pengendalian biaya operasional guna tercapainya efisiensi pengeluaran kas perusahaan.

Kata Kunci: Biaya operasional.

PENDAHULUAN

Pada era resesi ekonomi dunia seperti saat ini sangat menyulitkan kegiatan usaha, mulai dari pemangkas tenaga kerja sampai dengan banyaknya perusahaan yang tutup, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak. Perusahaan mengharapkan adanya stimulus ekonomi dari pemerintah khususnya di bidang perpajakan yang dapat menopang kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

Setiap unit kegiatan usaha tentunya mempunyai keinginan untuk terus dapat berkembang. Untuk itu semua perusahaan selalu berusaha untuk memproduksi barang berkualitas serta memberikan pelayanan jasa yang terbaik dengan mengeluarkan biaya operasional yang lebih efisien. Hal ini dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menjaga eksistensi usaha sekaligus meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun pasar global. Oleh karena itu upaya peningkatan penjualan sebagai langkah guna mencapai target pendapatan harus direncanakan dengan baik serta diterapkan dalam upaya riil. Selain itu yang tidak kalah pentingnya, yaitu pengawasan secara berkesinambungan tentang penggunaan atau pemanfaatan aset perusahaan, serta pengendalian secara optimal terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional usaha, sehingga aset kas yang digunakan untuk membayar biaya-biaya operasional harus bisa dikendalikan penggunaannya dan dikeluarkan hanya untuk keperluan operasional dalam jumlah yang terbatas dan diharapkan dapat memberikan manfaat pada saat sekarang ataupun di masa yang akan datang.

Pengendalian merupakan pengukuran kinerja dan upaya perbaikan terhadap pelaksanaan operasional dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, supaya pengeluaran kas sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka dirasa perlu bagi perusahaan untuk selalu meningkatkan pengendalian biaya operasional terhadap pencapaian efisiensi pengeluaran kas.

Agar bisa tercapai efisiensi pengeluaran kas, diperlukan upaya pengendalian biaya operasional. Hanya pengeluaran biaya operasional yang terkait dengan perolehan peningkatan pendapatan saja yang lebih diperhatikan. Namun dalam hal ini, penggunaan kas untuk membiayai pengeluaran operasional tersebut hendaknya juga memperhatikan aspek perpajakan, karena terdapat beberapa ketentuan perpajakan yang mengatur tentang pengeluaran biaya operasional yang tetap dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan usaha, seperti telah diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan. Sehingga menjadi suatu pertimbangan bagi perusahaan untuk memperhatikan aspek perpajakan atas pengendalian biaya operasional guna mencapai efisiensi pengeluaran kas perusahaan.

Dengan demikian, atas dasar uraian tersebut di atas, mengingat banyaknya pengeluaran kas terhadap biaya operasional perusahaan, maka diperlukan pertimbangan terkait aspek perpajakan tentang pengeluaran biaya operasional yang dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran kas perusahaan.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Biaya

Biaya adalah sejumlah kas atau nilai ekuivalen yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan dapat memberi manfaat pada saat ini atau di masa datang bagi organisasi perusahaan (Mulyadi, 2010:40).

Menurut Carter Usry (2004:29-30) konsep biaya telah berkembang sesuai kebutuhan akuntan, ekonom, dan insinyur. Akuntan telah mendefinisikan biaya sebagai “nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Dalam akuntansi keuangan, pengeluaran atau pengorbanan pada saat akuisisi diwakili oleh penyusutan saat ini atau di masa yang akan datang dalam bentuk kas atau aktiva lain”.

Sering kali istilah biaya (cost) digunakan sebagai sinonim dari beban (expenses). Tetapi, beban dapat didefinisikan sebagai aliran keluar terukur dari barang atau jasa, yang kemudian dibandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba. Beban diukur dengan nilai penurunan dalam aktiva atau peningkatan dalam utang yang berkaitan dengan produksi atau penyerahan barang dan jasa.

Biaya Operasional

Pengertian biaya operasional adalah biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan secara berkala supaya kegiatan produksi terlaksana dengan baik dan lancar. Biaya ini mencakup biaya pengupahan, penjualan, tunjangan karyawan dan kontribusi pensiun, transportasi, amortisasi dan depresiasi, sewa, perbaikan, hingga pajak. Selain itu, bisa dikatakan juga bahwa pengertian biaya operasional adalah biaya utama sebuah bisnis yang mencakup biaya umum, penjualan, dan administrasi. Biaya yang tergolong dalam biaya operasional adalah biaya yang ada hubungannya dengan aktivitas produksi.

Perusahaan harus melakukan pencatatan biaya operasional dan biaya non operasional secara teratur. Dalam melakukan pencatatan biaya operasional, sebaiknya dilakukan secara rutin/berkala, terutama terhadap biaya-biaya yang tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan operasional/biaya non operasional. Tujuannya agar pengusaha mendapatkan gambaran tentang perusahaannya di masa depan. Mencatat kedua jenis biaya ini akan membantu akuntan untuk mencari tahu kaitan antara biaya tersebut dengan aktivitas yang menghasilkan keuntungan terhadap perusahaan, serta untuk melihat kondisi bisnis di masa mendatang, memprediksi apakah bisnis perusahaan kedepannya akan berjalan dengan lancar atau tidak.

Kerugian dari melihat biaya operasi perusahaan merupakan angka yang absolut, bukan rasio. Dengan begitu, biaya tidak dapat dijadikan cerminan atas suatu perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, tidak masuk akal apabila digunakan sebagai indikasi antar perusahaan meski berada dalam industri serupa. Namun, biaya operasi perusahaan ini sangat berperan dalam menganalisis secara horizontal untuk mengetahui kinerja perusahaan saat ini berdasarkan data masa lalu.

Jenis Komponen Biaya

Perusahaan perlu memahami komponen biaya yang muncul dalam kegiatan usaha, sehingga dapat mengelompokkan biaya operasional dan biaya non operasional lebih terarah

Berikut ini adalah komponen kedua biaya yang dimaksud :

1. Biaya Operasional

Komponen biaya operasional terdiri dari biaya tetap, variabel, bunga, dan penyusutan.

- Biaya tetap adalah biaya yang nilainya tetap sama walaupun ada peningkatan pada produksi dan penjualan. Jadi, pengeluaran biaya ini tidak melihat bagaimana kondisi penjualan perusahaan. Contoh biaya yang termasuk biaya tetap adalah biaya gaji, maintenance, sewa, dan biaya asuransi.
- Biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Bila jumlah produksi mengalami peningkatan, maka biaya ini juga akan meningkat. Biaya ini akan turun bila kegiatan produksinya juga turun. Contohnya, ongkos kirim.
- Biaya penyusutan merupakan nilai yang akan terus berkurang setiap bulannya. Pengurangan ini terjadi karena adanya pemakaian. Misalnya, biaya penyusutan mesin produksi.

2. Biaya Non Operasional

Meskipun biasanya nilai dari biaya ini lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya operasional, biaya ini juga cukup penting. Sebab, biaya ini juga memberikan dampak bagi perusahaan. Maka dari itu, perusahaan perlu memperhatikan biaya ini beserta komponen yang ada di dalamnya.

Terdapat tiga komponen biaya non operasional, yaitu :

- Biaya sewa peminjaman barang atau harta adalah biaya yang perlu dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain atas peminjaman barang atau properti tertentu. Jumlahnya tidak tetap dan tidak harus dikeluarkan setiap waktu.
- Biaya bunga pinjaman merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada penyedia pinjaman. Luran ini juga tidak harus dibayarkan secara rutin.
- Biaya kerugian atas penjualan harta adalah biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena adanya penjualan harta. Contohnya, ketika perusahaan menjual perlengkapan kantor yang fungsinya sudah menurun. Bila harga jualnya lebih rendah dari harga beli maka muncul biaya rugi.

Contoh Biaya Operasional

Biaya operasional adalah biaya yang dipakai untuk mengerjakan kegiatan sehari-hari sebuah bisnis. Biaya ini berfokus pada kebutuhan bisnis dan bisa mengukur pendapatan perusahaan, seperti : gaji karyawan, tunjangan pegawai, transportasi, pajak, depresiasi dan amortisasi, komisi penjualan, kontribusi pensiun, perbaikan, utilitas.

Kategori Biaya Operasional

Biaya operasional terbagi dalam beberapa komponen biaya. Beberapa komponen dalam biaya operasional, antara lain :

– Biaya Tetap

Salah satu biaya yang termasuk biaya operasional adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dalam jumlah yang sama meskipun terjadi peningkatan dalam penjualan dan produksi. Jadi, biaya ini dikeluarkan tanpa mengamati kondisi bisnis. Biaya ini tidak terpengaruh dengan perubahan kegiatan tertentu dalam perusahaan. Contoh dari biaya tetap adalah biaya maintenance, biaya sewa, biaya asuransi, dan biaya gaji pegawai.

– Biaya Variabel

Berbeda dengan biaya tetap, biaya variabel justru dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan perusahaan. Apabila kegiatan produksi meningkat, maka biaya variabel juga akan mengalami peningkatan. Jika kegiatan produksinya menurun, maka biaya ini juga akan mengalami penurunan. Contohnya adalah biaya pengiriman bahan baku.

– Biaya Semi Variabel

Biaya lainnya yang termasuk biaya operasional adalah biaya semi variabel. Biaya semi variabel merupakan biaya yang dikeluarkan akibat perpaduan antara dua komponen sekaligus, yaitu variabel dan tetap. Salah satu contoh biaya ini adalah gaji lembur beberapa pegawai di perusahaan.

– Biaya Penyusutan

Biaya penyusutan adalah suatu nilai yang akan terus berkurang setiap bulannya. Sebab, beberapa barang mengalami penyusutan setiap bulan. Contohnya adalah alat kantor dengan mesin produksi, kendaraan, komputer, dan sebagainya.

Pengendalian Biaya Operasional

Berkembangnya perusahaan dalam bentuk yang lebih luas dan kompleks, menyebabkan terbatasnya kemampuan pimpinan dalam mengikuti dan mengendalikan seluruh aktivitas perusahaan. Hal ini menyebabkan pimpinan untuk mendelegasikan wewenangnya kepada orang lain. Sebagai akibatnya orang yang diberi tanggung jawab tersebut harus mempertanggung-jawabkan hasil pekerjaannya kepada pemberi tugas pimpinan. Dalam hal ini, pimpinan tidak cukup hanya menerima pertanggung-jawaban dari bawahan mengenai pelaksanaan tugas tersebut, tetapi juga harus melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tersebut agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang oleh bawahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengendalian yang cukup baik dan memadai dalam mengendalikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan.

Carter Usry (2004:6) berpendapat bahwa pengendalian adalah usaha sistematis manajemen untuk mencapai tujuan. Aktivitas-aktivitas dimonitor terus-menerus untuk memastikan bahwa hasilnya berada pada batasan yang diinginkan. Hasil aktual untuk setiap aktivitas dibandingkan dengan rencana, dan jika ada perbedaan yang signifikan, tindakan perbaikan dapat dilakukan.

Pengendalian diperlukan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Selain dengan semakin meluas dan kompleksnya perusahaan, manajemen dihadapkan pada keterbatasan kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan operasi perusahaan. Keadaan inilah yang menyebabkan manajemen melimpahkan tanggung

jawab dan wewenangannya untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dari itu diperlukan sistem pengendalian.

Menurut Mulyadi (2010:292) bahwa sistem pengawasan intern yang baik mengharuskan setiap pengeluaran kas dilakukan dengan cek dan untuk pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek (karena jumlahnya relatif kecil), dilakukan melalui dana kas kecil. Selain itu Mulyadi (2010:203) mengemukakan bahwa pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak praktis dibayar dengan cek, maka harus dibayar dengan uang tunai. Pembayaran dengan uang tunai dapat dilakukan jika dalam perusahaan dibentuk dana kas kecil, sedangkan kebanyakan pengeluaran biaya operasional nilainya relatif kecil dan dibayar secara tunai.

Efisiensi Pengeluaran Kas

Dalam hubungannya dengan pengeluaran kas, guna memperkecil resiko yang terjadi maka perlu meningkatkan pengendalian intern khususnya pengendalian intern atas biaya operasional terhadap efisiensi pengeluaran kas, mengingat seringnya pengeluaran kas untuk membayar biaya operasional perusahaan, maka diperlukan sistem pengendalian intern terhadap biaya operasional yang dapat melindungi harta milik perusahaan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran kas yang terjadi pada operasional perusahaan.

Hal tersebut merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mengendalikan biaya operasional terhadap efisiensi pengeluaran kas. Mengenai hal tersebut, apabila biaya operasional perusahaan tidak dapat dikendalikan dalam penggunaannya, kurang bahkan tidak dapat mengefisienkan biaya operasional tersebut, maka dapat mengakibatkan sistem pengendalian intern atas biaya operasional yang lemah, membuka peluang kerugian atas usaha yang dijalankan, sehingga resiko untuk memperoleh pendapatan laba menjadi lebih kecil. Oleh karenanya, diperlukan suatu sistem pengendalian intern atas biaya operasional terhadap efisiensi pengeluaran kas, agar semua harta perusahaan dapat terlindungi. (Mulyadi, 2010:15)

Tinjauan Perpajakan atas Pengendalian Biaya Operasional

Menurut Charter (2004:30) biaya operasional adalah suatu nilai tukar, pengeluaran, atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat. Pengeluaran atau pengorbanan dalam akuntansi dicerminkan oleh penyusutan atas kas, atau atas aset lain. Adapun biaya yang terjadi dan dibukukan dalam laporan laba rugi selanjutnya disebut dengan beban. Jumlah biaya penjualan atau biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum tersebut merupakan biaya operasional perusahaan. (Mulyadi, 2010:14)

Biaya pemasaran atau biaya penjualan merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan barang produksi hingga sampai kepada konsumen, sedangkan biaya administrasi dan umum menampung keseluruhan aktivitas administrasi yang berkaitan dengan kantor, misalnya : biaya gaji karyawan, biaya listrik dan air, biaya perlengkapan ATK, dan lainnya.

Biaya operasional perusahaan memiliki keterkaitan dengan Pajak Penghasilan perusahaan, karena dalam Undang-undang Perpajakan Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa biaya yang terkait dengan kegiatan usaha merupakan biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam menghitung penghasilan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri. Untuk itu diperlukan pengendalian atas biaya operasional, agar perusahaan dapat memaksimalkan laba yang diinginkan.

Companies that have competence in the fields of marketing, manufacturing and innovation can make it as a source to achieve competitive advantage (Daengs GS, et al. 2020:1419).

The research design is a plan to determine the resources and data that will be used to be processed in order to answer the research question. (Asep Iwa Soemantri, 2020:5).

Time management skills can facilitate the implementation of the work and plans outlined. (Rina Dewi, et al. 2020:14)

Standard of the company demands regarding the results or output produced are intended to develop the company. (Istanti, Enny, 2021:560).

Saat mengumpulkan sumber data, peneliti mengumpulkan sumber data berupa data mentah. Metode survei adalah metode pengumpulan data primer dengan menggunakan pertanyaan tertulis (Kumala Dewi, Indri et al, 2022 : 29).

Data analysis in the study was carried out through descriptive analysis method, which is defined as an attempt to collect and compile data, then an analysis of the data is carried out, while the data collected is in the form of words. (Kasih Prihantoro, Budi Pramono et al, 2021 : 198).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan berlandaskan filsafah pastpositivisme (memandang realitas atau gejala yang dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, teratur dan hubungan bersifat sebab akibat), untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana teknik pengumpulan data secara gabungan, serta analisis data bersifat induktif/kualitatif, sehingga hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena memaparkan keadaan suatu objek. atau masalah yang ada dalam penelitian. Dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti adalah aspek perpajakan atas pengendalian biaya operasional terhadap efisiensi pengeluaran kas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui deskriptif sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta serta hubungan antar permasalahan yang sedang diteliti kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan selanjutnya dibandingkan dengan teori yang ada untuk mendapatkan simpulan penyelesaian masalah yang tepat. (Sugiyono, 2011:86)

Dalam usaha mendapatkan dan mengumpulkan data pada penelitian ini, maka bisa diterapkan teknik analisis yang merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada pihak lain. Teknik analisa data yang digunakan antara lain : mengklasifikasikan biaya operasional dan biaya non operasional, kemudian melakukan koreksi fiskal positif dan negatif khususnya terhadap biaya operasional, serta melakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan besarnya pajak yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku, selanjutnya mengambil simpulan dan memberikan saran rekomendasi.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Aspek Perpajakan dalam Pengendalian Biaya Operasional

Biaya operasional yang dikeluarkan akan mengurangi saldo kas aktiva perusahaan, sehingga harus dapat dikendalikan biaya operasional tersebut agar bisa benar mencapai efisiensi pengeluaran kas perusahaan. Adapun pengendalian biaya operasional ditinjau dari aspek perpajakan, maka semua pengeluaran biaya operasional harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan, sehingga perlu adanya koreksi fiskal. Dari koreksi fiskal terhadap biaya-biaya operasional tersebut, akan berdampak pada penghitungan besarnya Pajak Penghasilan yang sebenarnya sesuai ketentuan perpajakan, sehingga perusahaan bisa terhindar dari sanksi pajak dan Pajak Penghasilan kurang bayar lainnya. Pada akhirnya pihak perusahaan akan dapat mencapai efisiensi pengeluaran kas melalui pengendalian biaya operasional dengan memperhatikan aspek perpajakan.

Adapun aspek perpajakan yang harus diperhatikan dalam pengendalian biaya operasional, diantaranya biaya-biaya operasional yang telah dibebankan dalam laporan keuangan komersial dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan mematuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Dengan tersusunnya laporan keuangan fiskal, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional usaha bisa terkendali secara optimal, sehingga aset kas yang digunakan untuk membayar biaya-biaya operasional dapat dikendalikan penggunaannya.

Koreksi Fiskal

Agar hasil dari suatu usaha dapat diketahui, pada setiap periode waktu tertentu perusahaan harus menyusun laporan keuangan yang merupakan hasil dari proses akuntansi perusahaan. Proses akuntansi tersebut dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, sehingga hasilnya tidak memihak dan dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan disebut juga laporan keuangan komersial. Dalam rangka perhitungan pajak yang terutang, dasar yang digunakan bukanlah laporan keuangan komersial, tetapi laporan keuangan menurut peraturan perpajakan atau yang disebut dengan laporan keuangan fiskal. Dalam perhitungan pajak perlu dilakukannya koreksi untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Hal yang dapat menyebabkan timbulnya koreksi fiskal antara lain karena adanya perbedaan konsep pendapatan, cara pengukuran pendapatan, omset biaya, cara pengukuran biaya, dan cara alokasi biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan.

Koreksi fiskal biasanya terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, sehingga menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Di dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, Wajib Pajak harus memperhatikan peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus direkonsiliasi atau koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya PKP.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu :

1. Beda Waktu

Beda waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi (ekonomi perusahaan) dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Misalnya, penyusutan atas harta golongan I menurut ketentuan perpajakan adalah 50% dari sisa nilai buku, dan menurut akuntansi disusutkan tarif 20% dari nilai perolehannya. Perbedaan cara penyusutan atas harta yang sama menghasilkan perbedaan besarnya penyusutan. Menurut ketentuan perpajakan jumlah penyusutan lebih besar pada tahun-tahun pertama, sedangkan menurut akuntansi (ekonomi perusahaan) besarnya penyusutan sama setiap tahunnya. Jika dihitung, maka akumulasi penyusutan pada akhirnya sama. Jadi yang terjadi adalah pergeseran biaya ke tahun-tahun pertama dan karena itu sifatnya sementara.

2. Beda Tetap

Beda tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi (ekonomi perusahaan) yang sifatnya permanen. Dengan arti lain, suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (taxable income). Misalnya, pemberian kenikmatan atau natura kepada pegawai sama sekali tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, sedangkan bagi perusahaan merupakan biaya yang harus diperhitungkan. Perbedaan pengakuan inilah yang disebut beda tetap. Hal-hal yang termasuk dalam beda tetap adalah Pemberian kenikmatan atau natura, biaya jamuan tamu, sumbangan, rugi penarikan harta tetap dari pemakaian, Pajak Penghasilan, pendapatan bunga, hibah atau warisan, bunga dan deviden.

Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial Menjadi Laporan Laba Rugi Fiskal

Penghitungan Pajak Penghasilan di akhir tahun bagi Wajib Pajak Badan didasarkan atas Laporan Keuangan Fiskal (Laba Rugi Fiskal). Padahal laba rugi fiskal disusun berdasarkan laba rugi komersial yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan (melalui rekonsiliasi). Rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan karena terdapat beberapa perbedaan perlakuan baik itu mengenai pengakuan penghasilan maupun mengenai biaya/beban. Rekonsiliasi yang dilakukan akan menghasilkan koreksi fiskal yang akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak serta Pajak Penghasilan (PPh) terutang. Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan (fiskal) yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu beda tetap dan beda waktu. Perbedaan tersebut dapat berakibat bertambahnya laba fiskal dari laba komersial yang telah dibuat oleh perusahaan (koreksi fiskal positif) dan dapat pula berlaku sebaliknya yaitu turunnya nilai laba fiskal dari laba komersial yang telah dibuat oleh perusahaan (koreksi fiskal negatif).

Berikut sajian rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal.

**Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi
Menurut Undang-Undang Perpajakan yang Berlaku**

Perusahaan LAPORAN LABA RUGI Untuk Periode yang Berakhir Pada 31 Desember 2021			
Keterangan	Laporan Laba Rugi Komersial	Koreksi Fiskal	Laporan Laba Rugi Fiskal
PENDAPATAN			
Peredaran Usaha	582.119.075		582.119.075
Total Pendapatan	582.119.075		582.119.075
BEBAN PENJUALAN			
Transportasi	123.273.000		123.273.000
Hotel	56.386.475		56.386.475
Restoran	2.930.000		2.930.000
Expenditure Tour	55.493.500		55.493.500
Guide Fee	25.148.500		25.148.500
Ticket	11.112.000		11.112.000
Treking	62.403.200		62.403.200
Beban Promosi			
Jumlah	336.746.675		336.746.675
LABA KOTOR	245.372.400		245.372.400
BEBAN ADM. & UMUM			
Beban Gaji	125.434.500		125.434.500
Beban Kantor	9.203.886		9.203.886
Konsumsi	2.927.000	2.927.000	0
Telepon	19.429.850		19.429.850
Listrik	8.419.600		8.419.600
Rekening Air	1.006.500		1.006.500
Iuran Anggota	140.000		140.000
Beban Berobat	2.114.000	2.114.000	0
Sumbangan	20.581.172	9.842.547	10.738.625
Beban Penyusutan	11.534.000		11.534.000
Beban Kendaraan	17.235.500		17.235.500
Pemeliharaan Aset	4.416.000		4.416.000
Lain-lain			
Jumlah	222.442.008	14.883.547	207.558.461
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK	22.930.392		37.813.939
PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2021	2.522.343		4.159.534
LABA BERSIH SETELAH PAJAK	20.408.049		33.654.405

Sumber : data diolah

Berdasarkan rekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal, terdapat beberapa koreksi fiskal yang dilakukan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan laporan keuangan yang ditentukan oleh peraturan perpajakan sehubungan dengan pembayaran pajaknya sebagai Wajib Pajak Badan dalam negeri, seperti pada biaya penyusutan (koreksi positif), beban konsumsi (koreksi positif), dan beban berobat (koreksi positif). Adanya pengkoreksian tersebut menyebabkan biaya yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan lebih besar dari yang sebelumnya. Penjelasanannya yakni sebagai berikut :

1. Biaya Konsumsi

Biaya konsumsi sebesar Rp 2.927.000,00 dikeluarkan dalam perhitungan laporan laba rugi fiskal karena biaya konsumsi ini merupakan beban yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan usaha. Hal ini dikarenakan biaya konsumsi ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi sebagian karyawan saja (yaitu para manajer), sehingga biaya konsumsi ini dikeluarkan (dikoreksi) dari biaya-biaya yang merupakan pengurang dari penghasilan usaha.

2. Beban Berobat

Beban berobat sebesar Rp 2.114.000,00 merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan berobat Direktur Utama, yang menurut UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan usaha karena merupakan biaya untuk keperluan pribadi pemilik usaha.

3. Beban Penyusutan

Beban penyusutan pada laporan keuangan komersial sebesar Rp 20.581.172,00, namun dalam biaya penyusutan tersebut perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 9.842.547,00 sehingga pada laporan keuangan fiskal menjadi Rp 10.738.625,00. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pengelompokan aktiva tetap menurut laporan keuangan perusahaan (komersial) dengan laporan keuangan fiskal yang berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Perbedaan pada ketiga akun beban tersebut tentunya menyebabkan terjadinya perbedaan nilai nominal Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan. Perhitungan besarnya Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Peredaran Usaha	582.119.075
Beban Penjualan	(336.746.675)
Laba Kotor (Laba Bruto)	245.372.400
Biaya yang Diperkenankan	(207.558.461)
Laba Bersih Tahun 2010	37.813.939
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	37.813.939
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Tahun 2021:	
22% x 50% x Rp 37.813.939	= 4.159.534
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	= 4.159.534
Kredit Pajak	= 0
PPh yang harus dibayar	= 4.159.534
PPh Pasal 25	= 2.323.000
PPh Pasal 29 (Kurang Bayar)	= 1.836.534

Perbandingan Besar Pajak Penghasilan Menurut Perusahaan dengan Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sebelumnya, maka dapat dihitung perbandingan besarnya Pajak Penghasilan menurut akuntansi komersial dengan besarnya Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pajak Penghasilan yaitu sebagai berikut :

1. Besarnya Penghasilan Kena Pajak menurut perusahaan adalah Rp 22.930.392,00, sedangkan menurut UU pajak yang berlaku adalah Rp 37.813.939,00.
2. Pajak Penghasilan yang terutang menurut laporan keuangan perusahaan adalah Rp 2.522.343,00 sedangkan menurut UU pajak yang berlaku, besar pajak penghasilan yang terutang (Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008) adalah Rp 4.159.534,00.
3. Berdasarkan perhitungan perusahaan besarnya PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) adalah sebesar Rp 199.343,00, sedangkan menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 besarnya PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) adalah sebesar Rp 1.836.534,00.

KESIMPULAN

1. Bahwa sebagai upaya pengendalian biaya operasional, pihak pelaku usaha hendaknya memperhatikan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan. Semua pengeluaran biaya operasional harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan, sehingga perlu adanya koreksi fiskal.
2. Koreksi fiskal terhadap biaya-biaya operasional berdampak pada penghitungan Pajak Penghasilan yang sebenarnya sesuai ketentuan perpajakan, sehingga perusahaan bisa terhindar dari sanksi pajak dan Pajak Penghasilan kurang bayar lainnya. Pada akhirnya pihak perusahaan akan dapat mencapai efisiensi pengeluaran kas melalui pengendalian biaya operasional dengan memperhatikan aspek perpajakan. Dengan tersusunnya laporan keuangan fiskal, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional usaha bisa terkendali secara optimal, sehingga aset kas yang digunakan untuk membayar biaya-biaya operasional dapat dikendalikan penggunaannya.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pihak pelaku usaha diharapkan selalu memperhatikan aspek perpajakan secara kontinu dan konsisten sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dalam rangka pengendalian biaya operasionalnya.
2. Selalu menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan dalam menyusun laporan keuangan fiskal, sehingga perusahaan bisa terhindar dari sanksi pajak dan pajak kurang bayar lainnya, sehingga akan dapat dicapai efisiensi pengeluaran kas melalui pengendalian biaya operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Carter WK.dan MF Usry. 2004. Akuntansi. Edisi Ketigabelas. Jakarta : Salemba Empat.
- Daengs, G. S. A., Istanti, E., Negoro, R. M. B. K., & Sanusi, R. (2020). The Aftermath of Management Action on Competitive Advantage Through Proccess Attributes at Food and Beverage Industries Export Import in Perak Harbor of Surabaya. *International Journal Of Criminology and Sociologi*, 9, 1418–1425.
- Enny Istanti1), Bramastyo Kusumo2), I. N. (2020). IMPLEMENTASI HARGA, KUALITAS PELAYANAN DAN PEMBELIAN BERULANG PADA PENJUALAN PRODUK GAMIS AFIFATHIN. *Ekonomika* 45, 8(1), 1–10.
- Iwa Soemantri, Asep et al. 2020. Entrepreneurship Orientation Strategy, Market Orientation And Its Effect On Business Performance In MSMEs. *Jurnal EKSPEKTRA Unitomo* Vol. IV No. 1, Hal. 1-10.
- Kumala Dewi, Indri et al, 2022 Peningkatan Kinerja UMKM Melalui pengelolaan Keuangan,*Jurnal Ekonomi Akuntansi* , UNTAG Surabaya, Hal ; 23- 36
- Lumbantoruan, Sophar. 2005. Akuntansi Pajak. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Muhammad Y. 2011. “Koreksi Fiskal Untuk Pelaporan Pajak”. Malang
- Mulyadi. 2010. Pemeriksaan Akuntansi. Edisi Keenambelas. Yogyakarta : STIE YKPN.
- Prihantoro, Kasih, Pramono, Budi et all. 2021. Tourism Village Goverment Program, Caractized By State Defence As The Economic Foundation Of National Defence, *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, Vol. V, Issue V, Page 197-2001.
- Rina Dewi, et al. 2020. Internal Factor Effects In Forming The Success Of Small Businesses. *Jurnal SINERGI UNITOMO*, Vol. 10 No. 1, Hal. 13-21.
- Suandy, Erly. 2013. Perencanaan Pajak. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011.”Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B”. Bandung : Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.